

DYNAMIC EQUILIBRIUM MASYARAKAT LINTAS AGAMA DI JAWA DAN BALI

Binti Su'aidah Hanur

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

suaidah@badrussholeh.ac.id

Ike Rahayu Margi Lestari

MI Ma'arif Tabanan Bali

rahayuike405@gmail.com

Binti Supriati

MAN 2 Kediri Jawa Timur

bintynoufal82@gmail.com

Abstract: *Ethnic groups, languages, religions and beliefs are something risky to discuss since a long time of periods. The plurality and tolerance also shows difference level among countries. Religious moderation as a legal model of social integration in Indonesia has been published since 2019. this study aims to deeply reveal the best practices of dynamics social integration that occurred in Indonesia especially in Kediri and Bali. This research was conducted using a qualitative method, using a multisite study approach. Data was collected by using observation and interview methods and using relevant documents sources. The result of this study shows that when the local government does not interfere towards their social life so much, the interfaith relations has positive reversible at equal rate. The result also shows that the community itself is able to unite and build social harmony as well as when it was bridged by the local government as in other cities.*

Keywords: *dynamic equilibrium, interfaith relations, religious moderation.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diberitakan pada nuonline_id bahwasanya pada tanggal 25 November 2023 di Bitung Sulawesi utara terjadi bentrok massa aksi bela palestina dengan ormas setempat yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan beberapa orang menderita luka-luka. Kejadian tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dilansir dari Kumparan.com, setidaknya ada 4 (empat) konflik antar pemeluk agama yang pernah terjadi di Indonesia yaitu antara lain: Konflik Poso, Konflik Ambon, konflik tolikora dan konflik lampung. Di antara ke empat konflik tersebut, yang memakan waktu paling lama dalam penyelesaiannya adalah konflik ambon. Hasil analisis beberapa kasus tersebut di temukan fakta bahwa sumber ketegangan seringkali disebabkan karena rendahnya kualitas komunikasi antar pemeluk agama yang berbeda. Dialog yang dikembangkan



20-21 November 2023

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Hotel Santika Premiere Gubeng
Jl. Raya Gubeng No.54, Surabaya,

Halaman 629

cenderung mengarah satu arah atau monoton sehingga tidak menemukan titik temu sebagai jembatan dalam menyelesaikan konflik¹.

Segala sesuatu yang bersinggungan dengan entitas sosial, agama, ras dan suku sangat rentan terhadap konflik. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan yang plural ini. Salah satunya adalah dengan mendirikan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). FKUB ini didirikan pada tanggal 30 November 1969 yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dikuatkan dengan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 maret 2006. PBM tersebut memuat tiga hal; pertama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama. Kedua, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketiga, Pendirian Rumah Ibadat².

Selain itu Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia melalui badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI juga telah menerbitkan buku moderasi beragama pada tahun 2019³. Kemudian pada tahun 2021, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 897 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Keputusan tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan dalam penanganan konflik atas nama agama serta memberikan petunjuk praktik beragama yang moderat dan harmonis dalam bingkai bangsa dan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas moderatisme masyarakat Indonesia yang plural dan mengalami banyak tantangan seiring dengan perkembangan zaman yang dinamis. Lokus penelitian ini adalah masyarakat lintas agama yang tinggal di Jawa dan Bali. Masyarakat lintas agama yang tinggal di Jawa dan Bali sangat terkenal dengan toleransi yang tinggi. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan di kedua wilayah ini di antaranya penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Kontiarta dkk dengan artikel berjudul Komunikasi FKUB dan Umat Beragama di tengah Ancaman Intoleransi di Provinsi Bali. Dalam artikel ini Kontiarta menyatakan bahwa FKUB adalah salah satu media yang strategis dalam mempertemukan, mengkomunikasikan dan mempersatukan semua agama tanpa harus meniadakan satu sama lainnya⁴. Ahsanal Khalikin dalam artikel berjudul pandangan

¹ Asep Saiful Muhtadi, 'Komunikasi Lintas Agama: Mencari Solusi Konflik Agama', *Conference Proceeding ICONIMAD 2019*, 275 (2019), 274–300.

² Muhammad Anang Firdaus, 'EKSISTENSI FKUB DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT Eksistensi FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia', *Kontekstualita*, 29.1 (2014), 63–84.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam, Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama Dengan Lembaga Daulat Bangsa*, 2019.

⁴ Redi Panuju and I Wayan Kontiarta, 'Komunikasi Fkub Dan Umat Beraga Ditengah Ancaman Intoleransi Di Provinsi Bali I', *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3.1 (2018), 1–22 <<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/commed/article/view/586>>.



pemuka agama tentang urgensi pengaturan hubungan umat beragama di provinsi bali juga mengungkapkan hal senada⁵.

Penelitian selanjutnya adalah yang ditulis oleh Umi Hanik dkk. Dalam artikel yang berjudul slametan sebagai symbol harmoni dalam interaksi sosial agama dan budaya masyarakat desa Tanon kecamatan Papar kabupaten Kediri menyatakan komunikasi budaya lintas agama tanpa meninggalkan adat istiadat dan simbol-simbol budaya setempat pada perkembangannya mampu menjadi penyeimbang kehidupan antar umat beragama⁶. Hal senada juga di sampaikan oleh Aisyifa Waradyah Gayatri dalam penelitian yang berjudul Implementasi Budaya Toleransi Dalam Mewujudkan Harmoni Antar Umat Beragama di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Aisyifa juga menyebutkan implementasi toleransi antar umat beragama di wilayah tersebut sudah menjadi budaya dan di wujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan di berbagai aspek⁷.

Distingsi dari penelitian ini adalah tentang penemuan pola harmonisasi dan interaksi yang berbeda di kedua wilayah tersebut terutama ketika kegiatan keagamaan beberapa agama terjadi secara bersamaan tetapi memiliki ritual yang bertentangan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret sampai dengan 25 Maret 2023 dimana pada tanggal tersebut umat hindu sedang melaksanakan nyepi dan umat muslim sedang melaksanakan kegiatan Ramadhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi multisitus. Dari penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerapan moderasi beragama dan integrasi sosial yang dibangun oleh masing-masing kelompok diluar kedua wilayah tersebut.

POTRET KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA DI JAWA DAN BALI

Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan pengelolaan pluralitas agama yang cukup baik dengan penuh kerukunan dimana Indonesia mayoritas dihuni oleh umat beragama Islam (Muslim)⁸. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri hingga akhir tahun 2022, komposisi mayoritas penduduk beragama Islam dengan 87,02%, penduduk beragama Kristen 7,43%, penduduk beragama katolik 3,06%, penduduk beragama hindu 1,69% dan penduduk beragama Buddha 0,73%. Akan tetapi realitasnya mozaik kehidupan lintas agama lebih banyak melibatkan relasi antara Islam dan Hindu.

Kerukunan antar umat beragama didefinisikan sebagai kondisi sosial di mana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa kehilangan hak dasar mereka untuk memenuhi kewajiban agamanya. Trilogi kerukunan antar umat beragama terdiri dari: 1.

⁵ A Khalikin, 'Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Umat Beragama Di Provinsi Bali', *Harmoni*, 14.3 (2015), 77–84 <<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/1290/PNLT1949.pdf?sequence=1&page=116#page=79>>.

⁶ Umi Hanik and Moh. Turmudi, 'Slametan Sebagai Simbol Harmoni Dalam Interaksi Sosial Agama Dan Budaya Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31.1 (2020), 135–52 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.990>>.

⁷ Aisyifa Waradyah Gayatri, 'Implementasi Budaya Toleransi Dalam Mewujudkan Harmoni Antar Umat Beragama Di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri' (IAIN Kediri, 2020).

⁸ Mohamad Ali Hisyam and Wan Zailan Kamarudin Wan Ali, 'Harmoni Lintas Agama Masyarakat Tengger', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 10.1 (2015), 82–107.



Kerukunan internal masing-masing dalam satu agama atau komunitas agama; 2. Kerukunan di antara umat beragama atau komunitas agama yang berbeda; dan 3. Kerukunan antar umat beragama atau komunitas agama yang sama dengan pemerintah⁹. Secara garis besar, keserasian dan keselarasan antar pemeluk agama di Jawa dan Bali terprotret sebagai berikut:

1. Potret Kehidupan Beragama di Jawa

Potret kehidupan beragama di Jawa mengambil lokus penelitian di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data hasil penelitian terdahulu Desa Tanon sudah terkenal dengan tingkat toleransinya yang tinggi. Masyarakat desa Tanon terbagi kedalam tiga kelompok agama yakni Islam, Hindu dan Katolik. budaya toleransi yang dikembangkan mencakup seluruh aspek kehidupan mereka karena toleransi sudah menjadi budaya yang secara otomatis menjadi bagian dari perilaku kehidupan sehari-hari mereka mulai dari pertetanggaan, kegiatan kesusahan, kegiatan lingkungan, kegiatan kepemudaan, kegiatan kelompok usaha dan kegiatan perayaan hari besar serta doa bersama dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Hanik dan Trumudi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang membuat desa ini mampu mewujudkan toleransi yang cukup baik, pertama elit ketiga agama di posisikan sebagai figure panutan masyarakat sehingga memiliki peran sebagai penyeimbang kehidupan keagamaan dan adat istiadat budaya desa Tanon. Kedua, elit agama Hindu di desa Tanon tidak mengenal kasta dan mengamalkan ajarannya sesuai dengan adat istiadat budaya masyarakat. Ketiga, elit agama Katolik berfokus pada keutuhan umat dan lebih toleran terhadap agama lain dengan terlibat dalam kegiatan lintas agama, seperti slametan atau pembersihan desa. Keempat, elit agama Kristen dalam kehidupan agama mereka juga berfokus pada keutuhan umat. Kelima, masyarakat agama Tanon terdiri dari tiga kelompok: elit agama, aktif keagamaan, dan awam. Dan keenam, keberagaman agama telah menjadi cara komunikasi budaya dan perkembangannya, dan masyarakat telah mempertahankan adat istiadat dan simbol-simbol budaya setempat hingga saat ini¹⁰.

Implementasi budaya toleransi di desa Tanon di dasari mengakui, menghargai dan bekerjasama. Mengakui artinya masing-masing pemeluk agama memberi tempat kepada umat beragama lain untuk mengamalkan agama dan meyakini sesuai dengan keyakinannya. Menghargai artinya ketika pemeluk agama lain sedang melakukan peribadatan maka pemeluk agama lain tidak mengganggu jalannya peribadatan. Kerjasama artinya antar pemeluk agama saling bahu membahu dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan di desa Tanon¹¹.

2. Potret Kehidupan Beragama di Bali

Khalikin menjelaskan Pemerintahan Bali hampir mirip dengan pemerintahan provinsi lain di Indonesia. Namun, ada sedikit perbedaan dalam struktur pemerintahan desa/kelurahan hingga RW dan RT. Di Bali, struktur administratif terdiri dari kepala

⁹ Deandlles Christover, 'Peran Pemuda Lintas Agama Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama', *Jurnal Paradigma*, 8.2 (2019), 114–28.

¹⁰ Hanik and Trumudi.

¹¹ Gayatri.



desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, dan ketua RT. Banjar, yang mirip dengan kampung, terdiri dari 50 hingga 200 KK (kepala keluarga). Setiap desa di Bali dipimpin oleh bendesa adat, atau kelian desa, yang memiliki posisi yang hampir setara dengan kepala desa atau lurah, kecuali bahwa bendesa adat bertanggung jawab untuk menjalankan awegaweg, atau undang-undang adat, di desa tersebut. Dalam hal keagamaan, kehidupan sehari-hari di Provinsi Bali diwarnai oleh upacara keagamaan Hindu¹².

Data yang dihimpun oleh Putra menyebutkan bahwa terdapat beberapa kampung yang di tempati oleh masyarakat muslim di Bali seperti di daerah Kusamba (Klungkung), Kampung Kepaon, Kampung Arab, Kampung Sanglah, Kampung Jawa (Badung) Pulukan (Jembrana), Pegayaman, Tegallinggah, Banjar Jawa, KampungIslam, Kampung Bugis, Kampung Kejanan (Buleleng), Loloan Barat, Loloan Timur, Kampung Pangembangan, Banyubiru (Negara)¹³. Lokus penelitian ini berada di Tabanan Bali. sebagian besar penduduk Provinsi Bali termasuk di Tabanan beragama Hindu akan tetapi juga diwarnai oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Bali dan Walikota terkait dengan fungsinya dalam memberikan pelayanan di bidang kehidupan keagamaan masyarakat¹⁴. Hal senada juga di sampaikan oleh Kontiarta. Kontiarta menjelaskan bahwa Meskipun mayoritas orang Bali beragama Hindu, hampir setiap waktu bisa mendengar suara Adzan¹⁵. Ini berarti bahwa kebijakan di Bali pun tidak melarang umat Islam mendirikan masjid. Komunikasi internal umat Hindu cenderung dipandu oleh pendekatan mereka terhadap komunikasi kelompok. Selain itu, Putra menunjukkan bahwa kerja sama dalam hal keamanan adalah salah satu contoh nyata toleransi di Bali. Dan tindakan yang dilakukan oleh orang Hindu dan Muslim untuk berbagi makanan saat masing-masing mengadakan perayaan¹⁶.

DYNAMIC EQUILIBRIUM

Dynamic Equilibrium di artikan sebagai “*positive reversible at equal rate*” yaitu sebuah hubungan timbal balik yang sama-sama menimbulkan dampak positif di kedua sisi. Perayaan Nyepi bagi umat hindu tahun ini bertepatan dengan awal bulan Ramadhan. *Dynamic equilibrium* atau pola harmonisasi yang muncul dalam kegiatan tersebut tentunya memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pola intervensi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di kedua wilayah lokus peneitian.

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Tanon, aktivitas keagamaan cenderung bersifat mandiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama kegiatan nyepi dan kegiatan penyambutan awal Ramadhan berlangsung, di temukan fakta bahwa

¹² Khalikin.

¹³ Rinaldi Permana Putra, ‘Awal Penyebaran Dan Perkembangan Agama Islam Di Pulau Bali’, *Jurnal Keislaman*, 6.1 (2023), 41–49 <<https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3622>>.

¹⁴ B Nurhamidin, ‘Strategi Tokoh Lintas Agama Dalam Mengatasi Konflik Pada Masyarakat Plural:(Studi Kasus Di Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow)’, *Farabi*, 18.1 (2021), 22–51 <<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/2415>>.

¹⁵ Panuju and Kontiarta.

¹⁶ Panuju and Kontiarta.



umat hindu di desa Tanon yang sedang melaksanakan nyepi tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan ketika Ramadhan, seperti kegiatan sholat tarawih, kegiatan bangun sahur dan aktivitas lain yang selalu mewarnai bulan Ramadhan. Kegiatan *Ngembak Geni* bagi umat hindu di desa Tanon hanya berlaku di domestik mereka. Tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur dan mengikat kegiatan tersebut karena masing-masing pemeluk agama sangat menjunjung tinggi adat istiadat desa mereka.

Kondisi berbeda ditemui di Tabanan Bali, sebagaimana uraian di atas yang menyatakan bahwa upacara-upacara keagamaan umat Hindu sangat mewarnai kehidupan masyarakatnya begitu pula ketika kegiatan Nyepi di tahun 2023 ini. Kegiatan nyepi yang bertepatan dengan awal Ramadhan umat muslim ini di atur oleh peraturan Gubernur Bali yang berisi seruan bersama majelis-majelis agama dan lembaga sosial keagamaan Provinsi Bali tahun 2023 di tandatangani oleh ketua PHDI Prov. Bali, Bandesa Agung MDA Prov. Bali, Ketua FKUB Prov. Bali, Ketua MUI Prov. Bali, Ketua Umum MPUK Prov. Bali Ketua MATAKIN Prov. Bali, Ketua Umum Walubi Prov. Bali, Keuskupan Denpasar, Kakanwil Agama Prov. Bali, Kapolda Bali, Komandan Korem 163/Wirasaty dan juga Gubernur Bali. Seruan tersebut kemudian diteruskan dan di sosialisasikan di semua wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Bali.

Dalam seruan tersebut, poin yang disebutkan dengan jelas bahwa umat Islam di serukan untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing atau rumah ibadah terdekat dengan berjalan kaki, tidak menggunakan pengeras suara dan dengan menggunakan lampu penerangan yang terbatas. Hal tersebut juga berlaku untuk umat agama lain. Seruan tersebut bersifat mengikat dan mutlak di laksanakan karena juga terdapat seruan kordinasi antara Prajuru Desa Adat, Pecalang, Linmas dan Aparat Desa/kelurahan dengan aparat keamanan terkait perihal mengamankan rangkaian hari suci Nyepi tersebut¹⁷.

Dari hal tersebut di atas dapat kita pahami bahwa ada tiga hal akan menyebabkan harmoni dan integrasi sosial: pemahaman agama yang inklusif, ketaatan pada hukum, memaafkan masa lalu, kepercayaan, dan hubungan antarwarga¹⁸. Ketika berbicara harmoni dan integrasi sosial lintas agama, maka ada 3 (tiga) pola interaksi sosial yang terbangun disana¹⁹. Pertama, pola interaksi konsentris yang digambarkan di atas mengatakan bahwa jika seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka juga akan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Sebaliknya, jika seseorang memiliki hubungan yang buruk dengan Tuhan, mereka juga akan memiliki hubungan yang buruk dengan sesama. Oleh karena itu, hubungan dengan Tuhan pada dasarnya bermakna.

¹⁷ Thaufiq Hidayat, 'Dari Intoleransi Menuju Kerjasama Lintas Agama: Studi Kasus Masyarakat Muslim', *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 2.1 (2021), 38–51 <<https://doi.org/10.15548/al-adyan.v2i1.1985>>.

¹⁸ Mochammad Rizal Ramadhan, 'Integrasi Nilai Islam Moderat Dalam Pendidikan Islam Untuk Memperkuat Harmoni Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Plural', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3.1 (2019), 701–9 <<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/283>>.

¹⁹ Masduki Masduki, 'Filosofi Interaksi Sosial Lintas Agama: Wawasan Islam', *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6.1 (2014), 107 <<https://doi.org/10.24014/trs.v6i1.900>>.



Pola interaksi sosial kedua yaitu pola interaksi terikat dimana model hubungan timbal balik adalah cara yang tepat untuk berinteraksi antar individu dan masyarakat; ini adalah pola interaksi yang melibatkan keterlibatan dua arah yang saling mempengaruhi. Interaksi timbal balik terjadi bukan hanya di struktur sosial yang paling kecil, individu, tetapi juga di struktur sosial yang lebih besar, masyarakat. Interaksi timbal balik juga terjadi pada individu dan masyarakat yang seagama. Pola interaksi sosial yang ketiga adalah pola interaksi terikat. Pola interaksi ini didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian. Pola hubungan sosial lintas budaya, bangsa, dan agama ini adalah pola hubungan eksternal yang paling efektif bagi masyarakat Islam. Jaminan keamanan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, jaminan keamanan berlalu lintas, dan jaminan keamanan bertempat tinggal biasanya termasuk dalam pola kesepakatan interaksi model ini. Untuk menghargai eksistensi manusia, setiap kesepakatan harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten. Sebaliknya, melanggar perjanjian berarti merusak dan mencederai moralitas²⁰.

Meskipun ketiga pola interaksi tersebut saling terkait, akan tetapi interaksi lintas agama yang berkembang di Desa Tanon berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan cenderung mengarah kepada pola interaksi sosial terikat. Hubungan sosial lintas budaya yang tumbuh dan berkembang di desa Tanon sangat menjunjung tinggi profesionalitas. Di Desa Tanon tidak pernah terjadi konflik atas nama agama. Pun, yang terjadi ketika kegiatan Nyepi berlangsung. Warga muslim memang diperkenankan melaksanakan kegiatan Ramadhan seperti biasa, akan tetapi secara adat istiadat mereka tetap menjaga kesakralan pelaksanaan kegiatan nyepi tersebut dengan tidak menyalakan speaker mushola/masjid secara berlebihan. Kegiatan pemerintahan juga berjalan sebagaimana biasanya meskipun beberapa perangkat yang beragama Hindu yang sedang melaksanakan kegiatan Nyepi tidak bisa hadir di dalamnya.

Sedangkan pola interaksi sosial yang berkembang di Tabanan Bali, cenderung mengarah kepada pola interaksi sosial terikat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya seruan bersama dari pemerintah Provinsi Bali dan segenap jajaran pimpinan yang ada. Pola interaksi tersebut terbentuk karena masyarakat Bali bersifat heterogen dimana penduduk Bali berasal dari banyak daerah serta banyak negara sehingga di perlukan sinergitas antar seluruh pemangku kebijakan. Berbeda halnya dengan masyarakat di Desa Tanon yang bersifat homogen dimana satu sama lain memiliki kesamaan dalam hal profesi mayoritas maupun kebudayaan.

Ditinjau dari kacamata moderasi beragama, ukuran-ukuran moderasi beragama yang mencakup 4 (empat) hal yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif²¹. Ke empat hal tersebut telah pula di terapkan dengan cukup baik. Komitmen kebangsaan merupakan ukuran apakah seseorang menjadi moderat atau radikal karena kebanyakan gerakan radikal mengadopsi khilafah atau negara shari'ah yang menganggap ideologi negara bangsa dianggap sebagai bid'ah, thagut, dan kafir yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Peristiwa Bom Bali adalah contoh dari gerakan radikal yang menggerogoti persatuan Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat.

²⁰ Masduki.

²¹ M Thoriqul Huda, 'Pengarurusan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan Dan Peluang FKUB Jawa Timur', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32.2 (2021), 283–300.



. Hormat, optimis, dan menerima orang lain sebagai bagian dari diri kita selalu terkait dengan toleransi. Toleransi, sebagai sikap terhadap perbedaan, adalah dasar demokrasi karena demokrasi hanya dapat berfungsi ketika seseorang mampu menahan pendapatnya sendiri dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah negara dapat diukur dengan melihat seberapa toleran negara tersebut. Untuk mencapai transformasi sosial-politik, kaum moderat selalu menggunakan metode yang damai daripada kekerasan sebagai indikator dari sifat anti kekerasan. Sedangkan akomodatif diwujudkan dalam perilaku mampu mengontekstualisasi nilai-nilai agama sambil mempertahankan prinsip-prinsip dan inti dari ajarannya.

Kualitas moderatisme masyarakat Indonesia yang plural yang telah berkembang selama ini sudah di anggap mumpuni dan dikategorikan cukup baik di mata dunia. Sebagai negara multikultural dari segi agama, Indonesia memiliki agama yang berbeda di setiap bagian masyarakatnya, entah itu mayoritas atau minoritas. Untuk mempertahankan keharmonisan dan persaudaraan antar umat beragama, keragaman ini membutuhkan pendekatan baru bagi tokoh agama. Akan tetapi kemudian tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman yang dinamis adalah terkait dengan kepedulian dari generasi muda atau gen Z. Usia milenial atau generasi muda adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap pengaruh ideologi radikalisme. Salah urus dalam membangun karakter generasi penerus dapat membuat negara ini hancur. Salah satu cara untuk membangun kesadaran kemajemukan bangsa adalah dengan menanamkan sikap moderasi beragama pada generasi milenial, sehingga generasi berikutnya dapat menghindari sikap ekstrim, intoleran, dan radikal²².

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam mempertahankan keharmonisan dan persaudaraan antar umat beragama, tokoh agama harus mengambil pendekatan baru mengingat Indonesia adalah negara yang multikultural dari segi agama dengan agama yang berbeda di setiap bagian masyarakatnya, entah itu mayoritas atau minoritas. Penanaman akan pentingnya pendidikan, sebagai sarana memahami makna moderasi beragama juga merupakan bagian penting dari peran pemerintah. Pembauran hidup dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang layak membantu membentuk tindakan yang harmonis. Para tokoh agama harus dapat memosisikan diri saat berdakwah, terutama dalam konteks masyarakat plural. Oleh karena itu, tokoh agama sangat berperan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dan selalu melakukan konsolidasi antar umat beragama untuk membahas program dan tugas tokoh agama itu sendiri dengan tetap menghormati tradisi, adat istiadat, dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama yang mulai diimplementasikan di lingkungan kementerian dan lembaga adalah salah satu ikhtiar untuk pembelajaran moderasi generasi milenial sebagai pewaris adat istiadat dan kebudayaan Indonesia.

²² Dinil Abrar Sulthani, 'Konsep Pendidikan Agama Pada Zaman Milenial', *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3.2 (2021), 216–35 <<https://doi.org/10.33367/ijies.v3i2.1419>>.



DAFTAR PUSTAKA

- Christover, Deandlles, 'Peran Pemuda Lintas Agama Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama', *Jurnal Paradigma*, 8.2 (2019), 114–28
- Firdaus, Muhammad Anang, 'EKSISTENSI FKUB DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT Eksistensi FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia', *Kontekstualita*, 29.1 (2014), 63–84
- Gayatri, Aisyifa'Waradyah, 'Implementasi Budaya Toleransi Dalam Mewujudkan Harmoni Antar Umat Beragama Di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri' (IAIN Kediri, 2020)
- Hanik, Umi, and Moh. Turmudi, 'Slametan Sebagai Simbol Harmoni Dalam Interaksi Sosial Agama Dan Budaya Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31.1 (2020), 135–52
<<https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.990>>
- Hidayat, Thaufiq, 'Dari Intoleransi Menuju Kerjasama Lintas Agama: Studi Kasus Masyarakat Muslim', *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 2.1 (2021), 38–51
<<https://doi.org/10.15548/al-adyan.v2i1.1985>>
- Hisyam, Mohamad Ali, and Wan Zailan Kamarudin Wan Ali, 'Harmoni Lintas Agama Masyarakat Tengger', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 10.1 (2015), 82–107
- Huda, M Thoriqul, 'Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan Dan Peluang FKUB Jawa Timur', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32.2 (2021), 283–300
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam, Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama Dengan Lembaga Daulat Bangsa*, 2019
- Khalikin, A, 'Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Umat Beragama Di Provinsi Bali', *Harmoni*, 14.3 (2015), 77–84
<<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/1290/PNLT1949.pdf?sequence=1&page=116#page=79>>
- Masduki, Masduki, 'Filosofi Interaksi Sosial Lintas Agama: Wawasan Islam', *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6.1 (2014), 107
<<https://doi.org/10.24014/trs.v6i1.900>>
- Muhtadi, Asep Saiful, 'Komunikasi Lintas Agama: Mencari Solusi Konflik Agama', *Conference Proceeding ICONIMAD 2019*, 275 (2019), 274–300
- Nurhamidin, B, 'Strategi Tokoh Lintas Agama Dalam Mengatasi Konflik Pada Masyarakat Plural:(Studi Kasus Di Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow)', *Farabi*, 18.1 (2021), 22–51
<<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/2415>>
- Panuju, Redi, and I Wayan Kontiarta, 'Komunikasi Fkub Dan Umat Beraga Ditengah Ancaman Intoleransi Di Provinsi Bali I', *Commed : Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3.1 (2018), 1–22



“Local Cultural Values and Religious Moderation”

Binti Su'aidah Hanur – IAI Badrus Sholeh Kediri, Ike Rahayu Margi Lestari –
MI Ma'arif Tabanan Bai, Binti Supriati – MAN 2 Kediri Jawa Timur

<<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/commed/article/view/586>>

Ramadhan, Mochammad Rizal, 'Integrasi Nilai Islam Moderat Dalam Pendidikan Islam Untuk Memperkuat Harmoni Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Plural', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3.1 (2019), 701–9
<<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/283>>

Rinaldi Permana Putra, 'Awal Penyebaran Dan Perkembangan Agama Islam Di Pulau Bali', *Jurnal Keislaman*, 6.1 (2023), 41–49 <<https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3622>>

Sulthani, Dinil Abrar, 'Konsep Pendidikan Agama Pada Zaman Milenial', *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3.2 (2021), 216–35
<<https://doi.org/10.33367/ijies.v3i2.1419>>

